

## PENYUSUNAN INDIKATOR DAN PEMETAAN KANTONG KEMISKINAN DI YOGYAKARTA: PENDEKATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI

Nano Prawoto<sup>1</sup>, Agus Tri Basuki<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jalan Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Indonesia  
Phone +62 274 387656. E-mail korespondensi: nanoprawoto@yahoo.com

Naskah diterima: Januari 2015; disetujui: Agustus 2015

**Abstract:** This study aims to identify pockets of poverty-based districts in Kulon Progo and formulate a common strategy for tackling poverty based on poverty levels in the district. The analytical method used to map poverty in Kulon Progo is Size Poverty Indicators consists of economic, geographic, and social health and education. Also used some tools i.e. shift share analysis, LQ, and Typology Klassen to determine economic development in Kulon Progo. The data used are primary data and secondary data. The results showed that the causes of poverty in Kulon Progo consists of a variety of complex factors and interrelated, namely geography, human qualities, facilities and natural conditions are less supportive of the development of economic activity resulting limited access resources, distribution of goods, lack of education, a potential health threat levels, and low levels of income, ownership of assets and the level of social welfare.

**Keywords:** poverty indicators; shift share; LQ; Typologi Klassen

**JEL Classification:** I32, R15

**Abstrak:** Studi ini bertujuan mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan berbasis kecamatan di Kabupaten Kulon Progo dan merumuskan strategi umum untuk menanggulangi kemiskinan berdasarkan pada tingkatan kemiskinan yang ada di kecamatan. Metode analisis yang digunakan untuk memetakan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo adalah Ukuran Indikator Kemiskinan terdiri dari aspek ekonomi, geografi, kesehatan dan pendidikan dan sosial. Selain itu digunakan beberapa alat analisis yaitu shift share, LQ, dan Tipologi Klassen untuk mengetahui perkembangan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo terdiri atas berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan, yaitu kondisi geografis, kualitas manusia, sarana prasarana dan kondisi alam yang kurang mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan terbatasnya akses sumber daya, distribusi barang, rendahnya pendidikan, potensi ancaman tingkat kesehatan, serta rendahnya tingkat pendapatan, kepemilikan aset dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** Indikator Kemiskinan; shift share; LQ; Tipologi Klassen

**Klasifikasi JEL:** I32, R15

### PENDAHULUAN

Kemiskinan pada dasarnya merupakan indikator klasik yang hingga saat ini menjadi momok bagi negara dunia ketiga. *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dideklarasikan oleh PBB pada

tahun 2000 mengharapkan seluruh negara yang menjadi anggota PBB dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di masing-masing negara hingga mencapai 50 persen pada tahun 2015.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33

persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih besar daripada daerah perdesaan. Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah dari Maret 2009 ke Maret 2010. Pada Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan begitu juga pada Maret 2010, yaitu sebesar 64,23 persen.

Persoalan kemiskinan menjadi isu yang tidak pernah habis hingga sekarang, apalagi yang berkaitan dengan kesuksesan kepemimpinan sebuah pemerintah daerah, topik kemiskinan seakan tidak lekang ditelan masa. Kepemimpinan pemerintah daerah akan dinilai berhasil apabila dapat menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat banyak secara merata.

Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan ini. Kajian yang paling mendesak agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif, maka diperlukan pemetaan tentang kemiskinan di berbagai kecamatan. Dengan diketahuinya kantong-kantong kemiskinan tersebut diharapkan dapat disusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang *pro poor*.

Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (*the modernisation paradigm*) yang kajiannya didasari oleh teori-teori pertumbuhan ekonomi, *human capital*, dan *the production-centred model* yang berporos pada pendekatan ekonomi neo-klasik ortodok (*orthodox neoclassical economics*) (Elson, 1997; Suharto, 2001; 2002a; 2002b). Sejak ahli ekonomi “menemukan” pendapatan nasional (GNP) sebagai indikator dalam mengukur tingkat kemakmuran negara pada tahun 1950-an, hingga kini hampir semua ilmu sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemajuan suatu negara.

Pengukuran kemiskinan yang berpijak pada perspektif “kemiskinan pendapatan” (*income poverty*) – yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan” – juga merupakan bukti dari masih kuatnya dominasi model ekonomi neo-klasik di atas. Karena indikator GNP dan pendapatan memiliki kelemahan dalam memotret kondisi kemajuan dan kemiskinan suatu entitas sosial, sejak tahun 1970-an telah dikembangkan berbagai pendekatan alternatif. Di antaranya adalah kombinasi garis kemiskinan dan distribusi pendapatan yang dikembangkan Sen (1973); Social Accounting Matrix (SAM) oleh Pyatt dan Round (1977); Physical Quality of Life Index (PQLI) yang dikembangkan Morris (1977) (lihat Suharto, 1998).

Pemetaan tentang profil kemiskinan di perdesaan sangat diperlukan oleh pengambil kebijakan terutama untuk penanganan masalah kemiskinan. Keterangan mengenai jenis persoalan dan akar permasalahan yang dihadapi berbagai jenis segmen penduduk miskin dapat membantu perencana program dalam menentukan program-program yang tepat. Dengan mengetahui pemetaan kemiskinan di perdesaan, pengambil kebijakan bisa lebih memfokuskan pada program pengentasan kemiskinan di perdesaan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari sumbernya, data dasar yang digunakan dalam studi ini ada dua jenis yaitu data sekunder dan data primer. Lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 2 tahun.

### Alat Analisis

Pelaksanaan pekerjaan menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menyajikan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, menghimpun data dan menyajikannya. Pendekatan

katan pelaksanaan pekerjaan menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilaksanakan untuk merumuskan indikator rawan pangan yang relevan dengan wilayah yang dikaji. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai pembanding dan memperjelas data kuantitatif yang ada dengan memakai strategi studi kasus. Strategi studi kasus dipilih karena kekhasan masalah, selain kemampuannya dalam menjelaskan fenomena sosial secara lebih mendalam (Cresswel, 1994; Babie 2004 dalam Sitorus,1999).

### **Karakteristik Rumah Tangga Miskin**

Hasil pendataan BPS pada tahun 2010 menunjukkan sebagian besar dari rumah tangga miskin mempunyai 4,9 anggota rumah tangga. Jumlah rata rata anggota rumah tangga ini lebih besar dibanding jumlah rata rata anggota rumah tangga tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin harus menanggung beban yang lebih besar dibanding rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin di daerah perkotaan rata rata mempunyai 5,1 anggota rumah tangga, sedangkan rumah tangga miskin di daerah perdesaan rata rata mempunyai 4,8 anggota rumah tangga. Berdasarkan angka ini dapat diketahui bahwa beban rumah tangga miskin di daerah perkotaan dalam memenuhi kebutuhan hidup ternyata lebih besar daripada rumah tangga miskin di daerah perdesaan.

Ciri lain yang melekat pada rumahtangga miskin adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang rendah. Data yang disajikan BPS memperlihatkan bahwa 72,01 persen dari rumah tangga miskin di perdesaan dipimpin oleh kepala rumahtangga yang tidak tamat SD, dan 24,32% dipimpin oleh kepala rumahtangga yang berpendidikan SD. Kecenderungan yang sama juga dijumpai pada rumah tangga miskin di perkotaan. Sekitar 57,02% rumahtangga miskin di perkotaan dipimpin oleh kepala rumah-tangga yang tidak tamat SD, dan 31,38 persen dipimpin oleh kepala rumahtangga berpendidikan SD. Ciri ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumahtangga miskin di perkotaan lebih tinggi dibanding kepala rumah-

tangga di perdesaan. Ciri rumah tangga miskin yang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan sebaran lokasi rumahtangga adalah sumber penghasilan. Menurut data BPS, penghasilan utama dari 63,0 persen rumahtangga miskin bersumber dari kegiatan pertanian, 6,4 persen dari kegiatan industri, 27,7 persendari kegiatan jasa-jasa termasuk perdagangan, bangunan dan pengangkutan, dan selebihnya merupakan penerima pendapatan. Pada tahun 1998 dan 1999 proporsi sumber penghasilan utama tidak mengalami pergeseran.

Dengan membedakan menurut daerah dapat dicatat bahwa sebagian besar atau sekitar 75,7 persenrumah tangga miskin di perdesaan mengandalkan pada sumber penghasilan di sektor pertanian. Lebih dari 75 persenrumah tangga miskin di perkotaan memperoleh penghasilan utama dari kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian dan hanya 24,0 persenrumah tangga miskin mengandalkan pada sektor pertanian. Ini konsisten dengan corak rumah tangga perdesaan yang sebagian besar adalah rumah tangga petani. Kegiatan ekonomi perkotaan yang lebih beragam memberikan sumber penghasilan yang beragam pula bagi rumah tangga miskin di perkotaan.

### **Pemetaan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo**

Sesuai dengan pendekatan pengukuran dan analisis penyebab kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo digambarkan pada Gambar 1.

Berbagai faktor penyebab kemiskinan tersebut, kemudian dapat dilakukan penetapan indikator dan parameter pengukuran kemiskinan. Penentuan indikator dan parameter ini juga mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik, khususnya untuk tahun 2010. Adapun indikator yang dimaksud adalah seperti pada tabel 1 (dalam Lampiran).

Hasil penentuan indikator dan penghitungan skor dapat kita buat peta wilayah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, dan dari hasil pemetaan kemiskinan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2. Perkembangan ekonomi kabupaten/kota terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2011

Proporsi Pertumbuhan	Kontribusi PDRB Kabupaten/Rerata Kontribusi PDRB Provinsi $\geq 1$	Kontribusi PDRB Kabupaten/Rerata Kontribusi PDB Provinsi $\leq 1$
Rerata Pertumbuhan PDRB Kabupate/Rerata PDB Provinsi $\geq 1$	Daerah Maju Berkembang Cepat Kota Yogyakarta	Daerah Berkembang Cepat Kabupaten Bantul
Rerata Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Rerata PDB Provinsi $\leq 1$	Daerah Potensial Kabupaten Sleman	Daerah Relatif Tertinggal Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Kulon Progo

Sumber:DIY dalam angka 2007-2011 (diolah)



Gambar 2. Kerangka Kerja Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Posisi Perekonomian Kabupaten Kulon Progo

Struktur ekonomi dan struktur sosial tiap kabupaten di DIY berbeda satu sama lain yang didasarkan pada Typology Klassen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi dalam pembentukan PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori.

Dalam analisis Typology Klassen dibagi menjadi 4 kategori dapat dilihat pada tabel 2:

(1) Daerah Maju Berkembang Cepat. Daerah yang memiliki ciri Kontribusi PDRB Kab/

kota/Rerata Kontribusi PDRB provinsi  $\geq 1$  dan Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Provinsi  $\geq 1$ .

(2) Daerah Berkembang Cepat. Daerah yang memiliki ciri Kontribusi PDRB Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB provinsi  $\leq 1$  dan Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Provinsi  $\geq 1$ .

(3) Daerah Potensial. Daerah yang memiliki ciri Kontribusi PDRB Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB provinsi  $\geq 1$  dan Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Provinsi  $\leq 1$ .

(4) Daerah Relatif Tertinggal. Daerah yang memiliki ciri Kontribusi PDRB Kab/kota/

Rerata Kontribusi PDRB provinsi  $\leq 1$  dan Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Provinsi  $\leq 1$ .

### Perkembangan PDRB Kabupaten Kulon Progo

Perkembangan PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2007 sd 2011 dapat dilihat pada tabel 3.

### Analisis Location Quotient (LQ)

Location Quotient (LQ) merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor (industri) tertentu.

$$LQ = (E_{ij}/E_j)/(E_{in}/E_n) \quad 1)$$

di mana,  $E_{ij}$  adalah Kesempatan kerja di sektor I di wilayah  $j$ ;  $E_j$  adalah Kesempatan kerja di wilayah  $j$ ;  $E_{in}$  adalah Kesempatan kerja di sektor I di negara  $n$ ,  $E_{ij}$  adalah Kesempatan kerja di negara  $n$ ;

Interpretasi dari hasil perhitungan dengan formula tersebut adalah:

Jika nilai  $LQ > 1$ , maka wilayah  $j$  untuk sektor I ada spesialisasi (Tingkat spesialisasi wilayah > tingkat spesialisasi nasional);

Jika nilai  $LQ = 1$ , maka wilayah  $j$  untuk sektor I ada spesialisasi (Tingkat spesialisasi wilayah = tingkat spesialisasi nasional);

Jika nilai  $LQ < 1$ , maka wilayah  $j$  untuk sektor I ada spesialisasi (Tingkat spesialisasi wilayah < tingkat spesialisasi nasional);

Analisis LQ menunjukkan bahwa seluruh kota/kabupaten baik yang berada dalam kawasan andalan maupun kawasan bukan

andalan, memiliki LQ yang lebih besar dari satu pada beberapa subsektor lapangan usaha. Artinya, semua kabupaten/kota memiliki subsektor unggulan dan penetapan kawasan andalan berdasarkan persyaratan sektor unggulan dapat dipandang tepat, lihat tabel 4.

Hasil perhitungan LQ dapat disimpulkan Kabupaten Kulon Progo memiliki keunggulan di sektor Pertanian, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan.

### Analisis Tipologi Klasen

Dengan menggunakan penghitungan *Tipology Klassen*, terlihat sebaran masing-masing sektor ditunjukkan dalam tabel 5. Berdasarkan penghitungan *Tipology Klassen* dibagi menjadi:

**Sub sektor Maju.** Subsektor yang memiliki ciri kontribusi subsektor Kab/kota/Rerata kontribusi PDRB kab/kota  $\geq 1$  dan rerata pertumbuhan subsektor (kab/Kota)/Rerata PDRB kab/kota  $\geq 1$

**Sub Sektor Berkembang.** Subsektor yang memiliki ciri kontribusi subsektor Kab/kota/rerata kontribusi PDRB kab/kota  $\leq 1$  dan rerata pertumbuhan subsektor (kab/Kota)/Rerata PDRB kab/kota  $\geq 1$ .

**Sub Sektor potensial.** Subsektor yang memiliki ciri kontribusi subsektor Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB kab/kota  $\geq 1$  dan rerata Pertumbuhan subsektor (kab/Kota)/Rerata PDRB kab/kota  $\leq 1$ .

**Sub sektor terbelakang.** Subsektor yang memiliki ciri Kontribusi subsektor Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB kab/kota  $\leq 1$  dan rerata pertumbuhan subsektor (kab/ Kota)/Rerata PDRB kab/kota  $\leq 1$ .

Hasil perhitungan pada tabel 5 terlihat bahwa sub-sektor maju terdiri dari sektor

Tabel 4. Perkembangan LQ Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 sd 2011

Lapangan Usaha	Nilai LQ				Rerata LQ
	2008	2009	2010	2011	
1. Pertanian	1,49	1,49	1,49	1,62	1,52
2. Pertambangan dan Penggalian	1,45	1,54	1,06	1,15	1,30
3. Industri Pengolahan	1,14	1,13	1,13	1,04	1,11
4. Listrik, gas dan Air bersih	0,67	0,68	0,70	0,12	0,54
5. Bangunan	0,52	0,53	0,54	0,56	0,54
6. Perdagangan, restoran dan hotel	0,81	0,81	0,82	0,83	0,82
7. Angkutan dan Komunikasi	1,01	1,00	0,99	0,94	0,98
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,67	0,69	0,70	0,65	0,68
9. Jasa-jasa	1,03	1,02	1,06	1,07	1,04

Tabel 5. *Klasen Typology* Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2007-2011

Proporsi Pertumbuhan	$\frac{Xi}{X} \geq 1$	$\frac{Xi}{X} \leq 1$
$\frac{\Delta Xi}{\Delta X} \geq 1$	<b>Sub Sektor Maju</b> Pertanian Jasa-jasa	<b>Sub Sektor Berkembang</b> Listrik, gas dan air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan restoran
$\frac{\Delta Xi}{\Delta X} \leq 1$	<b>Sub sektor Potensial</b> Pertambangan Industri Pengolahan	<b>Sub Sektor Terbelakang</b> Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2008-2011 (diolah)

pertanian dan jasa-jasa. Sedangkan sub sektor berkembang adalah sektor listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran. Sektor Potensial adalah sektor pertambangan dan industri pengolahan. Sedangkan sub sektor terbelakang adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

### Analisis Shift-Share

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi tiap-tiap subsektor terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis *Shift-share* dapat digunakan untuk mendeskripsikan *trend agregat* secara statistik, *shift-share analisis* mengklarifikasikan perubahan PDRB setiap saat dalam wilayah yang diperbandingkan dengan tiga kategori, komponen dalam membentuk *shift-share* di antaranya adalah PDRB di sektor tertentu (i) tingkat wilayah, laju pertumbuhan PDB tingkat nasional (rn), laju pertumbuhan PDB di sektor tertentu (i) di tingkat nasional (rin), dan laju pertumbuhan PDRB di sektor tertentu (i) tingkat wilayah (rij).

Komponen perubahan secara nasional mempresentasikan komponen pembagian nasional untuk perhitungan dimana laju pertumbuhan regional yang telah mengalami perubahan diikuti perubahan secara tepat dalam tingkat nasional untuk semua sub sektor dalam periode penilaian.

Jika pertumbuhan di tingkat regional berbeda dengan nasional (berupa positif atau negatif dalam pergeseran PDRB), secara total pergeseran terdiri dari pergeseran struktural juga pergeseran mengenai pembagian proporsional.

Dampak perubahan PDRB dimana dalam perhitungan di tingkat regional berubah sesuai dengan tipe dari PDRB dalam sub sektor tertentu (termasuk cepat atau lambatnya laju pertumbuhan nasional). Pergeseran terdiri dari perbedaan dalam pergeseran juga pengetahuan tentang dampak regional dimana perhitungan PDRB regional berubah seiring dengan faktor lokasi di tiap regional, lihat tabel 6.

Tabel 6 hasil analisis memperlihatkan pada

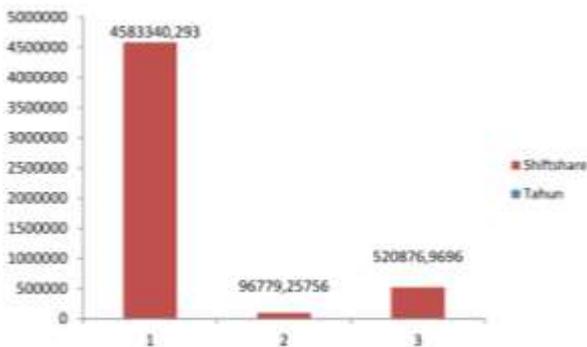
Tabel 6. Perkembangan *Shift Share* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 - 2011

Lapangan Usaha	2009				2010				2011			
	Nij	Mij	Cij	Dij	Nij	Mij	Cij	Dij	Nij	Mij	Cij	Dij
1. Pertanian	20.036	739	-3.928	16.847	21.189	-27.937	16.153	9.406	24.927	5.829	-18.987	11.768
2. Pertamb dan Penggalian	839	793	-222	1.410	574	-4.581	4.599	591	773	2.547	-2.517	803
3. Industri Pengolahan	13.101	-7.364	9.638	15.375	12.309	-1.218	3.515	14.606	13.468	-16.767	17.132	13.833
4. Listrik, gas dan Air bersih	465	252	-204	513	525	86	-36	574	606	-104	53	555
5. Bangunan	3.622	238	4.238	8.099	4.152	2.116	-2.304	3.964	5.052	4.833	-4.332	5.553
6. Perdag. restoran dan hotel	12.395	284	19.321	32.000	13.920	388	5.782	20.090	16.552	7.667	-752	23.467
7. Angkutan dan Komunikasi	7.575	873	47.867	56.315	8.350	-3.321	18.040	23.069	9.466	-5.041	22.762	27.188
8. Keua. Pesw dan Jasa Persh	4.654	4.767	146.808	156.229	5.286	1.539	-62.540	-55.715	5.906	-4.892	-42.343	-41.329
9. Jasa-jasa	12.420	-6.663	26.278	32.036	14.393	11.003	-12.367	13.029	17.118	7.985	-5.278	19.825
<b>PDRB</b>	<b>75.107</b>	<b>-6.081</b>	<b>249.797</b>	<b>318.823</b>	<b>80.697</b>	<b>-21.925</b>	<b>-29.159</b>	<b>29.613</b>	<b>93.867</b>	<b>2.058</b>	<b>-34.262</b>	<b>61.663</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo (Data diolah)

Keterangan :Nij adalah Pengaruh Pertumbuhan Provinsi; Mij adalah Pengaruh Bauran Industri; Cij adalah Pengaruh Keunggulan Kompetitif; Dij adalah Analisis *Shift-Share*

tahun 2011 terjadi pergeseran pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, artinya pergeseran pembangunan dapat dilihat dari laju pertumbuhan yang signifikan, sedangkan pengaruh keunggulan kompetitif mengalami penurunan terutama di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (akibat krisis Eropa dan Amerika). Hasil analisis *shift-share* pada tahun 2011 secara keseluruhan dengan melihat analisis *shift-share* pada PDRB mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2010, tetapi secara keseluruhan semua sektor terjadi penurunan keunggulan kompetitif dibandingkan tahun 2010 pada PDRB dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 3. Perubahan Shift Share Kabupaten Kulon Progo 2009-2011

Hasil penilaian dengan pendekatan skor menurut berbagai faktor penyebab kemiskinan, maka dapat diklasifikasikan masing-masing distrik menurut kedalaman tingkat kemiskinan. Klasifikasi ini terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu distrik yang masuk klasifikasi bukan kantong kemiskinan, distrik klasifikasi kantong kemiskinan sedang, dan distrik dengan klasifikasi kantong kemiskinan berat. Adapun secara rinci masing-masing distrik dapat dicermati pada tabel 10.

Walaupun seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo terbebas dari kantong kemiskinan, namun ada 4 kecamatan yang skornya dibawah 80 yaitu Kecamatan Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo dan Sanigaluh, artinya di kecamatan ini masih terdapat jumlah penduduk miskin di atas 8,5 persen.

Tabel 10. Kriteria Kedalaman Kemiskinan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Skor total	Kriteria Sebagai Kantong Kemiskinan
1	Temon	88	Bukan sebagai kantong kemiskinan
2	Wates	93	Bukan sebagai kantong kemiskinan
3	Panjatan	87	Bukan sebagai kantong kemiskinan
4	Galur	84	Bukan sebagai kantong kemiskinan
5	Sentolo	79	Bukan sebagai kantong kemiskinan
6	Lendah	84	Bukan sebagai kantong kemiskinan
7	Pengasih	79	Bukan sebagai kantong kemiskinan
8	Kokap	78	Bukan sebagai kantong kemiskinan
9	Girimulyo	79	Bukan sebagai kantong kemiskinan
10	Nanggulang	84	Bukan sebagai kantong kemiskinan
11	Kalibawang	83	Bukan sebagai kantong kemiskinan
12	Samigaluh	79	Bukan sebagai kantong kemiskinan

Kriteria: Skor >70: Bukan sebagai kantong miskin  
 Skor 51-70: Sebagai Kantong kemiskinan sedang  
 Skor < 50 : Sebagai kantong kemiskinan berat

### Strategi Memperkecil Jumlah Penduduk Miskin

Upaya pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), pendekatan penanggulangan kemiskinan (*Strategy for Poverty Reduction*) perlu disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan di wilayah distrik. Strategi ini menggunakan pendekatan berbasis hak (*right-based approach*) sebagai pendekatan utama dengan menegaskan adanya pencapaian secara bertahap dan progresif (*progressive realization*) dalam penghormatan (*respect*), perlindungan (*protect*) dan pemenuhan (*fulfill*) hak dasar rakyat, memberikan perhatian terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, serta percepatan pengembangan wilayah. Selain

itu, perlu ada Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

Untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui: bantuan dana stimulan untuk modal usaha terutama melalui kemudahan dalam mengakses kredit mikro dan UKM, pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan investasi dan revitalisasi industri termasuk industri padat tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana berbasis masyarakat yang padat pekerja.

Untuk pemenuhan hak dasar penduduk miskin secara langsung diberikan pelayanan antara lain pendidikan gratis bagi penuntasan wajib belajar 9 tahun termasuk bagi murid dari keluarga miskin dan penunjangnya; dan jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas III. Untuk mencapai ketiga langkah prioritas tersebut di atas, akan dikembangkan dalam budaya pembangunan di Indonesia adalah pemberdayaan masyarakat dan pelibatan peran aktif masyarakat terutama masyarakat miskinnya mulai dari perencanaan program pembangunan baik penentuan kebijakan dan penganggaraannya, maupun pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasinya.

### **Program dalam Memperkecil Keluarga Miskin**

#### ***(1) Menjaga Stabilitas Harga Bahan Kebutuhan Pokok***

Program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program ini meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut: (a) Penyediaan cadangan beras dan barang kebutuhan pokok; (b) Stabilisasi/kepastian harga komoditas barang-barang kebutuhan primer; (c) Peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan barang kebutuhan primer; (d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan produksi untuk barang kebutuhan primer; (e) Peningkatan akses modal bagi

prosen untuk barang kebutuhan primer; (f) Peningkatan kualitas distribusi barang kebutuhan primer

#### ***(2) Mendorong Pertumbuhan yang Berpihak Pada Rakyat Miskin***

Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Program ini meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut: (a) Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro; (b) Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola UMKM; (c) Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajemen UMKM; (d) Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal; (e) Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro; (f) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; (g) Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil; (h) Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; (i) Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

#### ***(3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan***

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jaminan adanya pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus pada wilayah-wilayah distrik yang memiliki kerentanan pada peningkatan jumlah masyarakat miskin. Langkah ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, yaitu: (a) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh di semua distrik; (b) Peningkatan akses sumber daya modal dan input lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan; (c) Pengembangan program-program pembangunan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja/padat karya; (d) Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor swasta; (e) Pertumbuhan ekonomi dan prasarana fisik dan non fisik.

#### ***(4) Memperluas Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat***

Program ini bertujuan meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Langkah ini meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut: (a) Program Pemberdayaan Masyarakat

di daerah perdesaan (Program Pengembangan Daerah Pedalaman); (b) Program Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perkotaan (Program Penanggulangan Kemiskinan di pusat Distrik); (c) Program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah; (d) Program pembangunan wilayah distrik yang tertinggal dan khusus; (e) Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

**(5) Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar**

Program ini bertujuan meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Langkah ini meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut: (a) Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); (b) Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA); (c) Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi; (d) Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit; (e) Pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas; (f) Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin.

**(6) Membangun dan Menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin**

Program ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Hal ini meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut: (a) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan *gender* (PUG) dan anak (PUA); (b) Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; (c) Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial; (d) Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs untuk bisa tetap sekolah; (e) Peningkatan pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat; Penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin).

**(7) Upaya mengatasi kekurangan gizi parah.**

Program ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi adanya gizi buruk bagi masyarakat miskin dalam jangka pendek. Program ini dapat dilakukan antara lain melalui: (a) Penanggulangan kekurangan sumber energi bagi penduduk miskin, (b) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, (c) Pemberian subsidi pangan bagi penduduk miskin, (d) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan kesehatan, (e) pelayanan gizi bagi ibu hamil dan balitadari keluarga miskin.

**(8) Program peningkatan sarana dan prasarana wilayah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sehingga akan meningkatkan akses masyarakat miskin. Langkah prioritas ini dilakukan antara lain dengan: (a) penyediaan sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih; (b) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga terutama wilayah distrik yang terisolasi dan tertinggal; (c) redistribusi sumber dana kepada distrik yang memiliki pendapatan rendah untuk pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. (d) Pengembangan fasilitas-fasilitas pelabuhan dan nelayan untuk meningkatkan produksi perikanan; (e) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah

**(9) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan: (a) Peningkatan kapasitas tata kelola penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan kapasitas birokrasi (b) Peningkatan kualitas *Good government governance* (3G) untuk kelembagaan pemerintah daerah dan di distrik; (c) Peningkatan kualitas *Good corporate governance* (GCG) untuk meningkatkan peran sektor swasta dalam penanggulangan kemiskinan; (d) Kemitraan dengan masyarakat sipil (*Public Private Partnership*) dalam penanggulangan kemiskinan; (e) Integrasi dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan provinsi dan nasional.

## SIMPULAN

Masalah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada dasarnya merupakan persoalan yang hingga saat ini belum teratasi dan akan terus memerlukan penanganan yang komprehensif. Rangkaian perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik di daerah telah membentuk kekhasan karakter kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, sangatlah penting dipertimbangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagai landasan awal dalam penanganan permasalahan kemiskinan. Berdasarkan survei dan analisis data-data sekunder yang telah dilakukan, yang digali dari sumber masyarakat miskin itu sendiri, maka untuk mengurangi tingkat kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan memutus faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Penyebab kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo terdiri atas berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan, yaitu kondisi geografis, kualitas manusia, sarana prasarana dan kondisi alam yang kurang mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan terbatasnya akses sumber daya, distribusi barang, rendahnya pendidikan, potensi ancaman tingkat kesehatan, serta berujung pada rendahnya tingkat pendapatan, kepemilikan aset dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang bersifat holistik dengan program yang saling mendukung satu dengan lainnya sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik. Sebagai dasar utama untuk menyusun strategi besar pembangunan nasional tersebut adalah politik ekonomi yang berpihak terhadap kaum miskin dan berkeadilan. Adapun yang menjadi elemen utama dalam strategi besar tersebut adalah pendekatan *people driven* di mana rakyat akan menjadi aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan kebijakan dan program. Untuk menyukseskan hal itu diperlukan pelaksanaan perubahan paradigma yang meredefinisikan peran pemerintah yang akan lebih memberi otonomi pada rakyat, adanya transformasi kelembagaan dari yang bersifat represif menjadi representatif, dan transparansi penyelenggaraan peme-

rintahan dalam program penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan diperlukan program-program pemerintah yang efektif dapat mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam pelaksanaan berbagai program pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat disatukan menjadi strategi besar, perlu dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

(1) **Program Penanggulangan Kemiskinan pada daerah kemiskinan berat.** Program penanggulangan kemiskinan pada daerah yang termasuk kategori kantong kemiskinan berat ini dilaksanakan secara menyeluruh atas 9 program yang telah direkomendasikan pada hasil kajian ini. Adapun prioritas masing-masing program disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing distrik. Dalam pelaksanaannya, program-program ini bisa bersifat generik, artinya program yang dilaksanakan pada beberapa distrik bisa bersifat seragam. Pada kasus ini program penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial.

(2) **Program Penanggulangan Kemiskinan pada daerah kemiskinan sedang**

Program penanggulangan kemiskinan pada daerah yang termasuk kategori kantong kemiskinan sedang dilaksanakan secara menyeluruh atas 9 program yang telah direkomendasikan pada hasil kajian ini. Namun prioritas masing-masing program didasarkan pada penyebab utama kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Pada kasus ini, program penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan untuk memutus faktor penyebab kemiskinan yang utama. Dengan demikian program ini bisa lebih bersifat khusus, misalnya program yang khusus untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, program khusus pengembangan industri kecil dan sebagainya.

(3) **Program Penanggulangan Kemiskinan pada daerah bukan kantong kemiskinan**

Program penanggulangan kemiskinan pada daerah yang termasuk kategori bukan kantong kemiskinan dapat dilaksanakan secara menyeluruh atas 9 program yang telah direkomendasikan pada hasil kajian ini. Namun prioritas masing-masing program didasarkan pada tar-

get grup masyarakat miskin. Artinya program-program yang dilaksanakan bisa bersifat spesifik tergantung pada karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing kelompok masyarakat, dengan kata lain program-program pada daerah/distrik ini dilaksanakan untuk mendorong berkembangnya kapasitas masyarakat menuju masyarakat yang lebih mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haris, Abdul. (2007). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Daerah Hutan Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Aflikasi Manajemen*. Vol. 5 No. 1, April. UPM. Probolinggo, 2007.
- Lastario, Arie. (1989). *Analisis Perbandingan Peningkatan Pendapatan dan Pemerataan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan Nusantara
- Bappenas. 1994. *Panduan Program Inpres Desa Tertinggal*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - departemen dalam negeri, 1994.
- M. Nuh. Nasir, Saicrudin dan Maulizar. (2008). Rumah Tangga di Purworejo. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No. 4., LIPI. Jakarta, Agustus 2008.
- Mulyo, Sumedi Andono. (2005). *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
- Nugroho, Gunarso Dwi. (2006). *Modul Globalisasi*. Banyumas: CV. Cahaya Pustaka.
- Kecamatan Temon Dalam Angka 2011
- Kecamatan Wates Dalam Angka 2011
- Kecamatan Sentolo Dalam Angka 2011
- Kecamatan Samigaluh Dalam Angka 2011
- Kecamatan Pengasih Dalam Angka 2011
- Kecamatan Kokap Dalam Angka 2011
- Kecamatan Girimulyo Dalam Angka 2011
- Kecamatan Nanggulan Dalam Angka 2011
- Kecamatan Kalibawang Dalam Angka 2011
- Kecamatan Galur Dalam Angka 2011
- Kecamatan Lendah Dalam Angka 2011
- Kecamatan Panjatan Dalam Angka 2011

## LAMPIRAN

Tabel 1. Ukuran Indikator Kemiskinan

Aspek Penyebab Kemiskinan	Indikator kemiskinan Masyarakat	Parameter	Skor Maks (N)	Bobot (B)	Score Maks (NxB)
1. Aspek Ekonomi (30%)	1) Pendapatan tetap	Rata-rata penghasilan masyarakat minimal Rp. 259.128.	10	1	10
	2) Ketergantungan pada sektor pertanian	Sumber pendapatan tidak tergantung dari sektor pertanian	7,5	1	7,5
	3) Kegiatan wirausaha /industri	Ada kegiatan wirausaha /industri	7,5	1	7,5
	4) Pengangguran	Masyarakat memiliki penghasilan tetap	5	1	5
2. Aspek Geografi (20%)	1) Kondisi topografi	Mendukung kegiatan ekonomi	5	1	5
	2) Kondisi geografis	Mendukung kegiatan ekonomi	5	1	5
	3) Ada sumber daya alam yang sudah terolah	Ada dan sudah terolah	5	1	5
	4) Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi	Ada dan lancar	5	1	5
3. Kesehatan (25%)	1) Akses Kesehatan	a. Tidak ada akses ke sarana kesehatan	10	0,6	6
		Tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan		0,4	
	2) Sikap hidup	a. Budaya hidup tidak sehat	7	0,2	3
		b. Adat yang tidak mendukung		0,3	

Aspek Penyebab Kemiskinan	Indikator kemiskinan Masyarakat	Parameter	Skor Maks (N)	Bobot (B)	Score Maks (NxB)
4. Pendidikan Sosial (25%)	3) Tempat Tinggal	a. Rumah tidak kokoh/permanen.	8	0,2	2
		b. Tidak memiliki MCK sendiri.		0,2	2
		c. Tidak menggunakan fasilitas energi.		0,2	2
		d. Kesulitan air bersih.		0,2	2
	1) Pendidikan	a. Tidak tamat sekolah dasar 6 tahun.	15	0,5	9
		b. Tidak mampu membiayai anggota keluarga pendidikan 9 tahun		0,25	3
		c. Akses ke Sekolah Menengah Atas		0,25	3
	2) Budaya	d. Sikap mental dan perilaku positif	5	1	5
		3) Jumlah Keluarga.	e. Tanggungan keluarga lebih besar sama dengan 4 orang.	5	1
	<b>Jumlah</b>			<b>100</b>	

Keterangan :Batasan masyarakat suatu kecamatan masuk kriteria miskin apabila memperoleh skor <71

**Tabel 3. Perkembangan PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2007-2011**

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	424.719	454.656	474.560	467.714	496.676
Pertambangan & Penggalian	17.686	17.027	18.527	12.664	15.395
Industri Pengolahan	251.351	255.420	261.033	271.689	268.349
Listrik, Gas dan air Bersih	9.611	10.333	11.006	11.586	12.068
Bangunan	77.911	82.096	85.790	91.657	100.658
Perdagangan, hotel & Restoran	266.357	281.420	293.574	307.245	329.807
Pengangkutan & Komunikasi	163.555	171.336	179.404	184.299	188.623
Keuangan, persewaan & jasa Perusahaan	98.323	101.551	110.230	116.678	117.684
Jasa-jasa	278.112	288.531	294.178	317.694	341.076
<b>PDRB</b>	<b>1.587.625</b>	<b>1.662.370</b>	<b>1.728.302</b>	<b>1.781.226</b>	<b>1.870.336</b>

**Tabel 7. Target Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 -2016**

Target	2012	2013	2014	2015	2016
KK	23,14	21,64	20,14	18,64	17,14
Jiwa	22,23	20,73	19,23	17,73	16,23

**Tabel 8. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2012**

No	Kecamatan	KK Miskin			Jml KK	Penduduk Miskin				Jml Penduduk	
		Jml KK Miskin	% dr KK per Kec	% dr Seluruh KK		% dr KK Miskin	Jml	% dr Penduduk per Kec	% thd Seluruh Penduduk		% thdp jml Penduduk Miskin
1	TEMON	1.296	13,31	0,94	3,80	9.734	4.168	12,73	0,88	3,73	32.741
2	WATES	1.913	12,78	1,38	5,61	14.964	6.303	12,03	1,34	5,64	52.408
3	PANJATAN	2.674	22,23	1,93	7,84	12.027	8.733	20,97	1,85	7,81	41.648
4	GALUR	2.132	19,93	1,54	6,25	10.695	6.307	18,26	1,34	5,64	34.547
5	LEDAH	3.121	24,30	2,26	9,16	12.842	9.469	22,86	2,01	8,47	41.430
6	SENTOLO	3.952	26,96	2,86	11,59	14.658	13.133	26,11	2,79	11,75	50.296
7	PENGASIH	3.495	22,58	2,53	10,25	15.477	11.474	21,52	2,44	10,27	53.309
8	KOKAP	4.340	38,63	3,14	12,77	11.235	14.853	37,84	3,15	13,29	39.254
9	GIRIMULYO	3.089	39,21	2,23	9,06	7.878	10.243	38,14	2,17	9,17	26.857
10	NANGGULAN	2.446	27,01	1,77	7,18	9.056	8.239	25,72	1,75	7,37	32.031
11	SAMIGALUH	2.848	30,25	2,06	8,35	9.415	9.612	30,59	2,04	8,60	31.419
12	KALIBAWANG	2.783	26,82	2,01	8,16	10.376	9.222	26,27	1,96	8,25	35.100
	<b>JUMLAH</b>	<b>34.089</b>	<b>24,64</b>	<b>24,64</b>	<b>100,00</b>	<b>138.357</b>	<b>111.756</b>	<b>23,73</b>	<b>23,73</b>	<b>100,00</b>	<b>471.040</b>

**Tabel 9. Target Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 -2016**

Target	2012	2013	2014	2015	2016
KK	23,14	21,64	20,14	18,64	17,14
Jiwa	22,23	20,73	19,23	17,73	16,23